

## Persepsi Warga Sekolah Terhadap *Full Day School* di SMP Negeri 32 Padang

Mardiatul Latifah, Hasrul

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: [mardiatulatifah@gmail.com](mailto:mardiatulatifah@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kurangnya kesiapan warga sekolah dalam menerima kebijakan full day school serta kurang efektifnya pengelolaan kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang menimbulkan beragam persepsi dari warga sekolah mengenai kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi warga sekolah terhadap kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah warga sekolah SMP Negeri 32 Padang dan sampel penelitian ini terdiri dari 82 orang warga sekolah. pengambilan data menggunakan kuesioner dengan opsi jawaban berupa skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan full day school kurang disetujui oleh warga sekolah. Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya ternyata kurang memberikan sosialisasi mengenai kebijakan full day school, warga sekolah belum siap untuk menerapkannya, sarana pendidik dan pegawai kurang mendukung kebijakan full day school, penambahan waktu belajar masih kurang terlaksana dengan baik, dan kebijakan mengenai program-program full day school lainnya kurang terlaksana dengan baik di SMP Negeri 32 Padang.*

**Kata Kunci:** Persepsi Warga Sekolah, Kebijakan, Full Day School

### ABSTRACT

*The lack of readiness school citizens in receiving about full day school policy and the lack of effectiveness management full day school policy in Junior High School of 32 Padang cause of many perception from school citizens about the policy. The purpose of this observation is describing about school citizens of full day school policy in Junior High School. This observation is quantitative with descriptive method, the population of this observation is school citizens of Junior High School of 32 Padang and the sample for this observation is composed 82 people from school citizens, the collecting data is using questionnaire with answer option of Likert Scale. The result is showing that full day school policy less approved by school citizens. That policy in implementation apparently lacking of giving socialization about full day school policy, school citizens are not ready to apply it, educational facilities and officers are not supportive full day school policy, additional studying time is still less well implemented, and the policy about other full day school programs are not well implemented in Junior High School of 32 Padang.*

**Keywords:** *Society Perceptions, Policy, Full Day School*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author and Universitas Negeri Padang.

Received: 2019-07-15

Accepted: 2019-08-23

## PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan harus diatur sedemikian rupa untuk merubah dan memperbaiki mutu pendidikan. Sehubungan dengan upaya tersebut, baru-baru ini digulirkan kebijakan *full day school*. *Full day school* adalah istilah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, dimana aktifitas belajar anak lebih banyak dilakukan disekolah dari pada dirumah. Proses belajar mengajar dilakukan dari pagi sampai sore hari. Sekolah yang melaksanakan *full day school* hari sekolahnya berlangsung selama 5 hari dalam satu minggu, dengan lama proses pembelajaran selama 8 (delapan) jam dalam satu hari. Secara umum *full day school* dibentuk untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat, diantaranya untuk mendapatkan pendidikan terbaik dari aspek akademik dan non akademik serta memberikan perlindungan bagi anak dari pergaulan bebas. Tujuan dari program *full day school* ini agar anak tidak hanya matang dalam segi akademis namun juga dari segi karakter dan waktu belajar anak lebih banyak disekolah sehingga orang tua tidak lagi khawatir terhadap anaknya.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang *full day school*, maka beberapa sekolah di Kota Padang menerapkan kebijakan tersebut. Berikut adalah data sekolah tingkat SMP yang menerapkan

kebijakan *full day school* di Kota Padang:

**Tabel 1. Data-Data Sekolah yang Full Day School**

No.	Nama Sekolah
1.	SMP Negeri 2 Padang
2.	SMP Negeri 7 Padang
3.	SMP Negeri 12 Padang
4.	SMP Negeri 16 Padang
5.	SMP Negeri 25 Padang
6.	SMP Negeri 27 Padang
7.	SMP Negeri 30 Padang
8.	SMP Negeri 32 Padang
9.	SMP Negeri 33 Padang

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang

SMP Negeri 32 Padang sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan *full day school*. Sesuai dengan kebijakan yang di keluarkan kepala sekolah SMP Negeri 32 Padang yaitu Dra.Hj. Doris Yelniwetis, dalam rapat dengan dewan guru serta wali murid pada tanggal 6 Agustus 2018, beliau mengatakan bahwa SMP tersebut akan melaksanakan *full day school* karena alasan untuk mengatasi permasalahan disekolah mengenai kebiasaan siswanya.

Siswa SMP Negeri 32 Padang ini memiliki kebiasaan yaitu pada saat jam sekolah habis siswa tidak langsung pulang, mereka berkeliaran disekitar lingkungan sekolah sampai sore. Maka dari itu SMP Negeri 32 Padang mengeluarkan kebijakan *full day school* agar siswa tetap berada disekolah sampai sore atau seharian penuh untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun ekstrakurikuler disekolah sehingga tidak ada waktu lagi untuk keluyuran di lingkungan sekolah dan program tersebut juga dapat membentuk karakter siswa yang mandiri karena siswa mampu menyisihkan waktu

dengan hal yang bermanfaat disekolah.

Maka dari itu berdasarkan persetujuan bersama maka SMP Negeri 32 Padang melaksanakan full day school dari tanggal 20 Agustus 2018. Program Full Day School ini dimulai dari pukul 07.15 sampai pukul 15.35. Kegiatan yang dilakukan pada sekolah full day school ini beragam mulai dari proses belajar mengajar, sholat zuhur berjama'ah di lapangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, satu jam terakhir siswa melaksanakan kegiatan mengerjakan tugas yang diberikan guru disekolah, dan juga di hari tertentu ada kegiatan pramuka wajib. Kegiatan full day school ini wajib diikuti oleh semua siswa kelas VII dan kelas VIII, guru maupun pegawai yang ada di SMP Negeri 32 Padang yang berjumlah 460 orang.

Namun dalam penerapannya kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang tidak selalu berjalan mulus, ada beberapa faktor yang dapat menghambat lancarnya penerapan full day school ini diantaranya kebijakan mengenai full day school belum efektif, adanya beragam respon mengenai kebijakan full day school oleh warga sekolah SMP Negeri 32 Padang. Permasalahan mengenai hambatan kebijakan full day school ini terlihat dari siswa yang kurang antusias dalam program ini, sehingga pada jam 13.40 wib mereka sudah resah dan sudah berdiri didepan pagar untuk dipulangkan serta siswa merasa kurang bersemangat ketika sudah berada pada jam siang. Lalu hal ini terlihat juga pada guru di sekolah tersebut, guru sudah mulai merasa resah pada jam siang berada dikelas dan guru-guru yang tidak ada kegiatan hanya tidur saja di kursi

ruang tamu kantor bahkan ada guru yang pergi meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah habis. Dari berbagai permasalahan yang muncul terhadap kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang maka menimbulkan beragam persepsi dikalangan warga sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian yaitu warga sekolah SMP Negeri 32 Padang. Sampel penelitian ini diambil melalui rumus Slovin yaitu 82 orang warga sekolah. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan opsi jawaban berupa skala Likert. Data dianalisis dengan persentase normal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang, dengan menyebarkan angket kepada 82 orang warga sekolah maka mendapatkan hasil penghitungan data yaitu mengenai proses perencanaan kebijakan full day school ada 35 atau 42,7% orang warga sekolah yang menyatakan sangat setuju, lalu ada 39 atau 47,6% orang warga sekolah yang memberikan jawaban setuju, namun selain itu masih ada 8 atau 9,8%. Maka dari itu persepsi warga sekolah mengenai proses perencanaan kebijakan full day school dinilai telah berjalan dengan baik karena banyak mendapatkan tanggapan setuju. Selanjutnya persepsi warga sekolah mengenai proses perencanaan kebijakan melibatkan warga sekolah mendapatkan hasil penghitungan yaitu ada 34 atau 41,5% orang warga sekolah, lalu ada 42 atau 51,2% orang warga sekolah yang memberikan

jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 6 atau 7,3% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju. Maka dari itu persepsi warga sekolah mengenai proses perencanaan kebijakan dalam melibatkan warga sekolah dinilai telah berjalan dengan baik karena banyak mendapatkan tanggapan setuju dari warga sekolah.

Persepsi warga sekolah mengenai sosialisasi kebijakan full day school mendapatkan hasil penghitungan yaitu ada 39 atau 47,6% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, lalu masih banyak warga sekolah yang menjawab kurang setuju yaitu ada 39 atau 47,6% selanjutnya ada 4 atau 4,9% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa persepsi warga sekolah mengenai sosialisasi kebijakan full day school kurang berjalan dengan baik karena banyak mendapatkan tanggapan kurang setuju oleh warga sekolah. Sama halnya dengan persepsi warga sekolah mengenai sarana tenaga pendidik dan pegawai dalam kebijakan full day school juga dinilai kurang baik karena mendapatkan banyak tanggapan kurang setuju dari warga sekolah. Hal ini di buktikan dengan tidak adanya warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 27 atau 32,9% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain juga masih banyak warga sekolah yang menjawab kurang setuju yaitu ada 47 atau 57,3% orang warga sekolah, selanjutnya ada 8 atau 9,8% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju.

Selanjutnya berjalan atau tidaknya suatu kebijakan full day school sangat tergantung kepada

sarana dan prasarana infrastuktur sekolah apakah telah mendukung atau belum untuk pelaksanaan kebijakan full day school. Dari hasil penghitungan data mendapatkan jawaban dari warga sekolah yaitu ada 31 atau 37,8% orang warga sekolah yang menjawab setuju, namun masih banyak warga sekolah yang kurang setuju yaitu ada 39 atau 47,6% orang warga sekolah, selanjutnya ada 12 atau 14,5% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dari penjelasan dapat diartikan bahwa persepsi warga sekolah mengenai sarana dan prasarana infrastruktur sekolah di SMP Negeri 32 Padang kurang baik karena mendapatkan banyak tanggapan yang kurang disetujui oleh warga sekolah. Begitupun dengan proses belajar mengajar full day school juga dinilai kurang berjalan dengan baik karena mendapatkan banyak tanggapan yang kurang disetujui oleh warga sekolah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 23 atau 28,0% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 43 atau 53,4%, selanjutnya ada 16 atau 19,5% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju.

Dalam penerapan full day school terdapat kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu, kebijakan tersebut yaitu mengenai penambahan waktu belajar, waktu ekstrakurikuler dan penambahan program-program baru untuk menunjang pelaksanaan kebijakan full day school ini. Mengenai penambahan waktu belajar mendapatkan penghitungan data yaitu tidak ada warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 28

atau 60,9% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 18 atau 39,1% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju, selanjutnya tidak ada warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Disamping itu mengenai penambahan waktu ekstrakurikuler mendapatkan persepsi yang kurang disetujui oleh warga sekolah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 32 atau 39,0% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun banyak warga sekolah yang menjawab kurang setuju yaitu ada 51 atau 62,2%, selanjutnya ada 14 atau 17,1% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Bagitupun dengan program-program lainnya seperti program pramuka wajib dan forum annisa jua mendapatkan persepsi yang kurang disetujui oleh warga sekolah dibuktikan dengan tanggapan warga sekolah yaitu tidak ada warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 23 atau 28,0% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun masih banyak warga sekolah yang menjawab kurang setuju yaitu ada 51 atau 62,2%, selanjutnya ada 19 atau 23,3% orang warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dalam hal ini berarti dalam penambahan waktu belajar, waktu ekstrakurikuler dan penambahan program masih dinilai kurang berjalan dengan baik oleh warga sekolah.

Berjalan atau tidaknya suatu kebijakan full day school sangat tergantung kepada kebijakan kegiatannya apakah telah mendukung kegiatan religius atau belum. Dari hasil penghitungan data mengenai kebijakan full day school mendukung kegiatan religius ada 24 atau 29,3%

orang warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 48 atau 58,5% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 10 atau 12,2% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju, selanjutnya tidak ada warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa persepsi warga sekolah memberi tanggapan setuju, dalam hal ini berarti kebijakan full day school telah mendukung kegiatan religius seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an setiap harinya.

Kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang akan berhasil apabila kebijakan full day school dapat membentuk sikap peserta didik baik itu dari akhlak, karakter maupun kemandirannya. Dari hasil penghitungan data mengenai kebijakan full day school membentuk akhlak ada 27 atau 32,9% orang warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 45 atau 54,9% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 10 atau 12,2% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju, selanjutnya tidak ada warga sekolah yang menjawab tidak setuju dan dari hasil penghitungan data mengenai kebijakan full day school membentuk karakter hanya 23 atau 28,0% orang warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 51 atau 62,2% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun selain itu juga masih ada 8 atau 9,8% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju, selanjutnya tidak ada warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan full day school dalam membentuk akhlak dan karakter

peserta didik dinilai telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga sekolah yang memberi tanggapan setuju. Beda halnya dengan kebijakan full day school membentuk kemandirian tidak ada warga sekolah yang menjawab sangat setuju, lalu ada 21 atau 25,6% orang warga sekolah yang memberi jawaban setuju, namun masih ada 50 atau 61,0% orang warga sekolah yang memberi jawaban kurang setuju, selanjutnya ada 11 atau 13,4% warga sekolah yang menjawab tidak setuju. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa kebijakan full day school dalam membentuk kemandirian peserta didik masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga sekolah yang memberi tanggapan kurang setuju.

Berdasarkan hasil di atas disimpulkan bahwa persepsi warga sekolah terhadap kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang secara keseluruhan mendapatkan banyak tanggapan kurang disetujui oleh warga sekolah. Dalam hal ini berarti warga sekolah SMP Negeri 32 Padang menyatakan full day school di SMP Negeri 32 Padang dalam kebijakannya masih kurang terlaksana dengan baik.

Kebijakan berarti "rencana kegiatan" pernyataan tujuan-tujuan ideal. Kebijakan adalah rangkaian asas dan konsep yang menjadi garis dasar atas rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan, pekerjaan, dan cara bertindak pemerintah sebagai pernyataan cita-cita dan tujuan untuk garis pedoman untuk manajemen pencapaian sasaran. Jadi kebijakan adalah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Majid (2018) kebijakan pendidikan adalah keputusan yang

bersifat kompleks atau sederhana yang dirumuskan melalui politik untuk suatu program serta rencana-rencana dalam pendidikan. Jadi dalam merencanakan suatu program dalam pendidikan perlulah suatu rancangan dan rumusan yang difikirkan secara matang kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik nantinya. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah untuk menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan dan mengembangkan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.

Kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan di dunia pendidikan adalah kebijakan mengenai hari sekolah, diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia No. 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Maka salah satu alternatif yang digunakan untuk capaian pendidikan tersebut maka diterapkanlah full day school di beberapa sekolah di Indonesia. Full day school berasal dari bahasa inggis yang artinya sekolah sepanjang hari, atau proses belajar yang dilaksanakan dari pukul 06.45 sampai 15.00. Full day school merupakan sekolah yang lebih menggali potensi anak didik secara total dengan menitik beratkan pada situasi dan kondisi dimana anak didik dapat mengikuti proses belajar dan bermain dengan demikian siswa tidak merasa terbebani dan merasa bosan di sekolah.

Penerapan full day school juga diterapkan di salah satu SMP Negeri di kota Padang yaitu SMP Negeri 32 Padang, menurut hasil rapat dan putusan yang dikeluarkan oleh pimpinan SMP Negeri 32 Padang sejak

tahun 2018 menerapkan full day school dengan tujuan SMP Negeri 32 Padang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi segala permasalahan yang ada di SMP Negeri 32 Padang selama ini. Akan tetapi tujuan tersebut masih kurang terlaksana dengan baik karena adanya beberapa hambatan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 32 Padang itu sendiri. Karena adanya kendala dan hambatan dalam penerapannya sehingga menimbulkan beragam persepsi dari warga sekolah SMP Negeri 32 Padang, ini dibuktikan berdasarkan temuan yang didapat yaitu masih banyak warga sekolah yang menyatakan kurang setuju dengan kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang.

Taufiqurakhman (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa didalam kebijakan terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, begitupun dengan kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang ini masih dinilai kurang efektif dan kebijakannya belum memikirkan segala aspek, baik itu dari segi kesiapan, sarana pendidik, maupun dalam penambahan waktu belajar.

Kurang efektifnya kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang karena terdapat berbagai dan hambatan antara lain kurangnya sosialisasi, kurangnya kesiapan warga

sekolah menerima kebijakan full day school, sarana pendidik dan pegawai yang kurang mendukung kebijakan full day school, penambahan waktu belajar, penambahan waktu ekstrakurikuler dan penambahan waktu untuk program-program full day school lainnya kurang terlaksana dengan baik.

Dalam merencanakan suatu kebijakan haruslah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan yang akan dilakukan. Seperti yang diungkapkan Vander (1979) sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seseorang mengenal cara berpikir, berperasaan dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa sosialisasi dapat memberikan cara berfikir pada manusia. Namun beda halnya dengan kebijakan full day school di SMP Negeri 32 Padang ini, warga sekolah masih kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 32 Padang ini. Sehingga pada saat penerapan kebijakan tersebut warga sekolah masih kurang siap dalam menerima kebijakan yang dikeluarkan pihak sekolah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan full day school yang dilaksanakan di SMP Negeri 32 Padang menimbulkan keragaman persepsi dikalangan warga sekolah terutama berkenaan dengan sosialisasi kebijakan full day school ternyata pihak sekolah kurang memberikan sosialisasi kepada warga sekolah mengenai kebijakan full day school, dalam pelaksanaannya lebih lanjut

masih kurang didukung oleh sarana pendidik dan pegawai serta sarana infrastruktur sekolah. Disamping itu juga warga sekolah kurang siap untuk menerima kebijakan full day school, disamping itu dalam penambahan waktu belajar, waktu ekstrakurikuler dan penambahan terhadap program-program full day school lainnya seperti pramuka wajib, forum annisa ternyata kurang terlaksana dengan baik, serta dalam konteks pembentukan sikap ternyata kebijakan full day school ini dinilai masih kurang mendukung dalam membentul kemandirian peserta didik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Majid abd. (2018). *Analisis kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: samudera biru.
- Permendikbud ri no. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.
- Taufiqurahkman. (2014). *Kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab kepada presiden selaku penyelenggara pemerintah*. Jakarta: fakultas ilmu sosial dan politik universitas moestopo beragama (pers)
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
- Vander, zanden j. W. (1979). *Sociology*. New york: john wiley and sons.